

DAFTAR PUSTAKA

- Azrial, Yulfian. 2003. *Budaya Adat Alam Minangkabau*. Padang: Angkasa Raya.
- Berdasarkan Pasal 1 Angka 12 PERDA Sumtaera Barat No. 16 Tahun 2008 Penghulu adalah pemimpin dalam suku atau pun kaum ia adalah pemegang hak ulayat atas sako (gelar kebesaran pemimpin) dan pusako (harta pusako berupa tanah ulayat dan harta benda).
- Boestami, Sjafnir Abu Naim dan Rosnida M Nur LC. 1992. *Kedudukan dan Peranan Wanita Dalam Kebudayaan suku Bangsa Minangkabau*. Padang : Esa Padang.
- BPN RI. 2007. *Bidang Pengkajian dan Penanganan sengketa dan konflik pertanahan, Workshop Strategi Penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan tahun 2007*.
- Hakimy Idrus, 1988, *Pegangan Penghulu, Bundo Kandung, dan Pidato Alua Pasembahan Adat Minangkabau*. Bandung: Remaja Karya.
- Haryanto, dkk. 2010. Bahan Ajar Kuliah Manajemen Konflik. Politik Lokal dan Otonomi Daerah (PLOD) UGM. Yogyakarta.
- Johan Bahder Nasution, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Mandar Maju, Bandung
- Kusmayanti, Hajar. 2022. *Praktik beracara penyelesaian sengketa adat Sumatera Barat berdasarkan asas batanggo naiak batanggo turun*. jurnal Ilmu hukum: refleksi hukum. vol. 6 no 2.
- Limbong, Benhard. 2011. *Konflik pertanahan*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- MS Amir. 1997. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta Mutiara Sumber Widya.

- Mukhsi. 2007. *Aspek Hukum Sengketa Hak Atas Tanah, Makalah disampaikan pada Workshop Strategi penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan yang di selenggarakan Badan Pertanahan Nasional RI*
- Murad, Rusmadi dalam Heru Nugroho. 2001. *Menggugat kekuasaan Negara*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Narvis, A.A. *Alam Berkembang Jadi Guru, Adat dan kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT.Grafiti. 1984.
- Nasutions. 1992. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nazir, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Nurullah. 1999. *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*. Padang : PT Singgalang Pers.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintah Nagari.
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang nagari perihal Kerapatan Adat Nagari
- Sulastryono dan Sandra Dini f. Aristya. 2011. Penerapan Norma Dan Asas-Asas Hukum Adat dalam Peradilan Perdata, Hasil Penelitian , Unit Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Sumardjono, Maria S.W. 2011. *Reorientasi kebijakan pertanahan*. penerbit kompas, yang di kutip oleh Benhard Limbong, *Konflik pertanahan*. Jakarta: Margaretha pustaka.
- Syarifuddin, Amir. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta : Gunung Agung.
- Toeah, Datoek. 1989. *Tambo Adat Minangkabau*. Pustaka Indonesia Bukittinggi.

Wingjodipoero, soerojo. 1967. *pengantar asas-asas Hukum Adat*. Haji Masagung.

Yusuf, A Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta:
Kencana.

Yuzastra, Dafto. 2010. *Peranan kerapatan adat nagari (KAN) dalam proses penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kecamatan Kuranji Kota Padang*. program pasca sarjana Universitas Diponegoro.